

BAB I

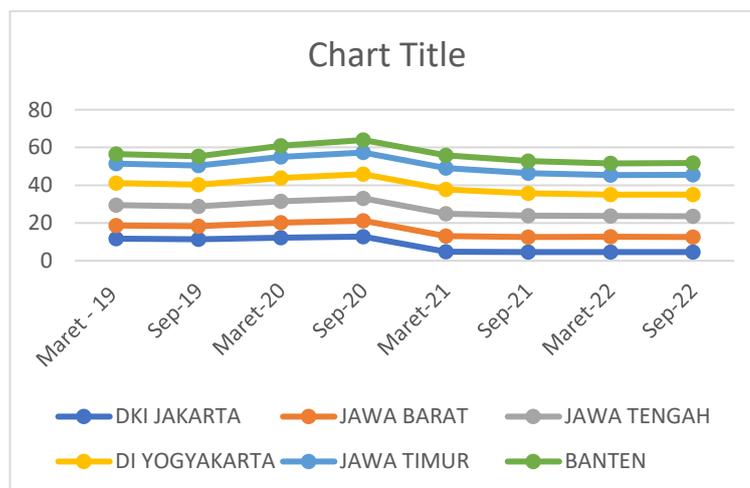
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di sebelah Timur Pulau Jawa. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi dan menjadi salah satu Provinsi yang menjadi pusat perekonomian baik di Pulau Jawa maupun Nasional. Dengan jumlah penduduk > 39 (juta) pada tahun 2018 hingga pada akhir tahun 2022 mencapai >41(juta) juta penduduk dengan didominasi usia produktif. ¹Dengan jumlah penduduk yang sedemikian rupa, dilain memiliki beberapa keunggulan dan nilai tambah tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain, namun Provinsi Jawa Timur juga memiliki memimiliki beberapa permasalahan diantaranya adalah masalah kemiskinan yang masih menjadi salah satu permasalahan utama.

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduknya yang banyak dan masih menjadi Provinsi yang masuk 3 besar dalam jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa.

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Miskin



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

¹ Badan Pusat Statistik, dalam <https://jatim.bps.go.id/>, diakses 28 Oktober 2023

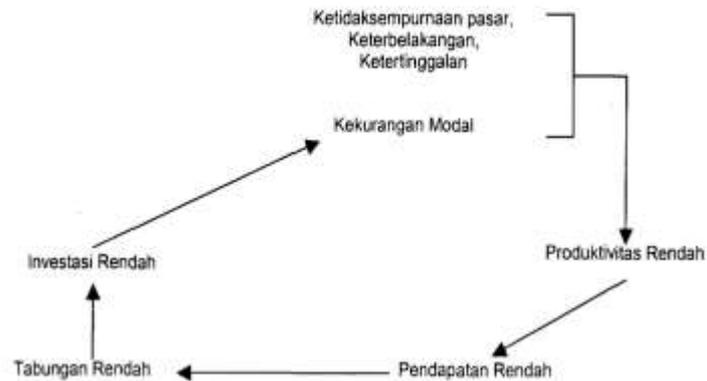
Indikator kemiskinan dapat diketahui dari jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin. Jika dilihat dari dua indikator tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir mengalami *trend* positif, dimana terdapat penurunan, baik dalam jumlah maupun presentase.² Namun pada tahun 2022 Jawa Timur sempat mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dalam rekapitulasi triwulan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Negara Indonesia sempat mengalami pandemi *Covid-19* hal ini juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Sebelum *Covid-19* melanda, angka kemiskinan Jatim pada September 2019 sebesar 10,20%. Kemiskinan tersebut naik pada Maret 2020 menjadi 11,46 %.³

Peningkatan dan penurunan tingkat kemiskinan serta ketidakpastian perekonomian masyarakat menjadi suatu hal yang harus diselesaikan oleh masing masing *stakeholder*. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu hal yang kompleks, dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kemiskinan, baik faktor internal maupun eksternal. Penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi, pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, dan rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan.

² M. Iskandar Edris, “Profil Kemiskinan Jawa Timur 2020”, (Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur) hlm. 31

³ Runik Sri Astuti, “Mencermati Anomali Kemiskinan di Jawa Timur” dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/30/mencermati-anomali-kemiskinan-di-brang-wetan>, diakses 28 Oktober 2023

Gambar 1.1
Skema Teori Lingkaran Kemiskinan



Sumber : Kuncoro, 1997:132

Berdasarkan pada teori tersebut, terdapat beberapa penyebab masalah kemiskinan, salah satunya yakni adalah pemberdayaan tingkat produksi suatu wilayah secara keseluruhan dan kualitas sumber daya manusia yang kurang optimal dan tepat guna, dalam hal ini bisa diambil bebetrapa indikator yakni tingkat pendidikan dan tenaga kerja suatu wilayah. Pada perkotaan di wilayah Jawa Timur, banyak program pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan , salah satunya ialah dengan pemberdayaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan ekonomi yang dulu dijadikan sebagai acuan utama keberhasilan pembangunan kewilayahan saat ini tidak dianggap lagi sebagai indikator utama dalam pembangunan kewilayahan. Faktanya beberapa negara dengan pertumbuhan pendapatan nasional yang cukup tinggi, namun *Human Development Index* ,masih rendah⁴

Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal salah satunya sangat ditentukan oleh Pendidikan, katrena Pendidikan dianggap memiliki peran penting sebgai jendela ilmu pengetahuan, sebab itu Pendidikan dianggap memiliki kunci dalam peran strategis pengentasan kemiskinan.

Tenaga kerja pada perkotaan di Jawa Timur memiliki bebrapa lapisan yang cukup kompleks, dimana dengan jumlah penduduknya yang tinggi dan

⁴ Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018*”, (Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur) hlm. 21

jumlah konsumsinya yang tinggi pula, Provinsi Jawa Timur membutuhkan banyak tenaga kerja yang diperlukan, namun di beberapa tahun tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur masih belum mengalami kestabilan, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah dan angka perkapita suatu wilayah. Beberapa faktor yang harusnya dapat mempengaruhi kemiskinan, di Provinsi Jawa Timur dalam ketiga aspek seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, tenaga kerja menjadi suatu hal yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain, namun dalam kenyataannya dalam hal ini antar faktor masih belum bisa maksimal.

Kemiskinan dapat ditinjau melalui tiga aspek, yakni aspek rumah tangga, aspek komunitas dan aspek wilayah. Pertama, kemiskinan erat kaitannya dengan aspek rumah tangga, yakni yang dapat menghambat penduduk miskin dalam mengakses peluang ekonomi⁵. Dalam hal ini mencakup beberapa hal seperti dalam ruang lingkup makro di suatu wilayah tertentu, beberapa indikator dapat dilihatnya tingkat kemiskinan atau kesejahteraan di suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam mempermudah mengakses peluang ekonomi salah satunya ialah dengan Pendidikan.

Lingkup atau komunitas memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dimana berdasarkan aspek komunitas dijelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh faktor budaya, norma, agama, serta pola pikir penduduk miskin pada suatu wilayah. Faktor komunitas ini menimbulkan adanya bias perspektif masyarakat terhadap kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat tidak memiliki daya juang untuk bangkit dari kemiskinan menyebabkan masyarakat sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan⁶. Dan dalam hal ini juga erat kaitannya dengan jumlah atau tingkat tenaga kerja dalam suatu wilayah, dimana untuk mengakses suatu pendapatan seseorang harus memiliki pekerjaan atau dalam artian seseorang haruslah menjadi tenaga kerja dan memiliki upah yang sesuai untuk dapat keluar dalam belenggu kemiskinan.

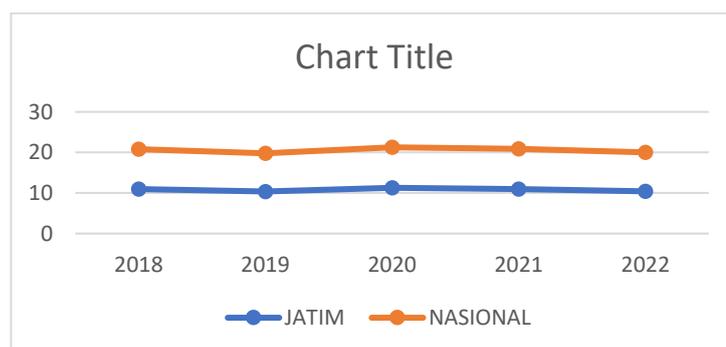
⁵ Dwi Astutik, Dwi Budi Santoso, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Timur Pendekatan Spasial" Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya, 2020 hlm 2.

⁶ *Ibid.*,

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial ekonomi yang sering terjadi di suatu wilayah, dengan berbagai faktor penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kabupaten, tetapi masyarakat perkotaan juga merasakannya. Di satu sisi kemiskinan merupakan sebuah proses dan di sisi lainnya kemiskinan juga merupakan konsekuensi terhadap masyarakat. Sebagai sebuah proses kemiskinan dan kegagalan dalam komunitas untuk mendistribusikan sumber daya dan aset secara adil kepada anggota komunitasnya. Oleh karena itu, dapat dilihat akibat dari ketidakmampuan dari salah satu lembaga ekonomi untuk mendistribusikan sumber daya yang secara adil dan terbatas kepada anggota masyarakatnya.

Grafik 1.2

Perbandingan Kemiskinan Jatim dan Nasional

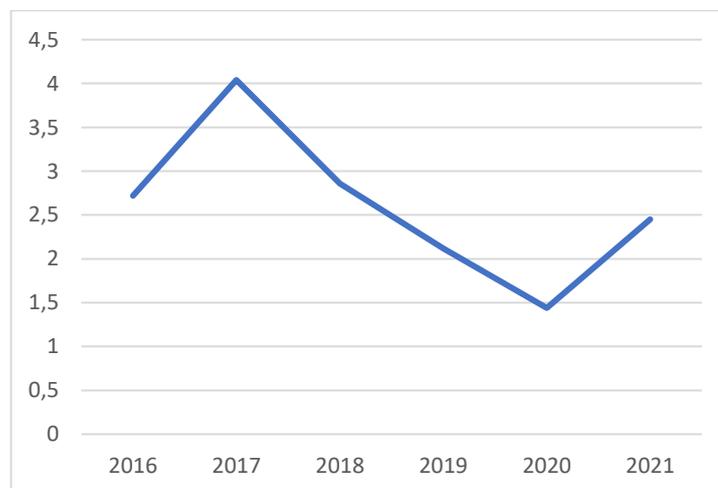


Sumber : BPS Jawa Timur

Masalah kemiskinan yang menjadi isu utama yang menghambat pembangunan di Jawa Timur khususnya dengan hadirnya beberapa daerah yang menjadi kantong kemiskinan. Pasalnya, tingkat kemiskinan Jawa Timur selalu berada diatas rata-rata nasional tahun 2010-2019 dan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia yakni 4,05 juta jiwa, Jika diklasifikasikan berdasarkan PDRB, maka wilayah yang tergolong miskin ini mayoritas adalah wilayah pertanian dan pesisir, namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis wilayah yang akan dijangkau adalah daerah perkotaan di Jawa Timur yang dimana peneliti berusaha untuk mengkaji apakah ketiga variabel atau faktor tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tingkat kemiskinan.

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antar golongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya.

Grafik 1.3
Tingkat Inflasi Jawa Timur



Sumber : BPS Jawa Timur

Inflasi di Jawa Timur sempat mengalami kenaikan di beberapa tahun secara tidak langsung adanya inflasi juga akan mempengaruhi adanya kemiskinan dilain faktor faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam pasar dan beredarnya uang masyarakat mengimdiskasikan seberapa banyaknya tingkat kemampuan masyarakat dalam mengsubtitusikan barang

dan jasa sehingga tingkat kemiskinan dengan memperhatikan inflasi dapat terbaca.

Oleh karena hal tersebut, peneliti bermaksud ingin mengkaji secara dalam dengan konsep dan teori yang relevan agar mengetahui apakah antar variabel saling mempengaruhi atau tidak dan maka perlu kiranya menyusun strategi percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Timur dengan terlebih dahulu mengkaji faktor - faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur dengan mempertimbangkan aspek yang berkaitan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh signifikan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh signifikan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018 -2022?
3. Bagaimana pengaruh signifikan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh signifikan PDRB, pendidikan, tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh signifikan PDRB terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022 ?
6. Bagaimana pengaruh signifikan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018 -2022?
7. Bagaimana pengaruh signifikan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022
2. Untuk menguji pengaruh signifikan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022
3. Untuk menguji pengaruh signifikan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022

4. Untuk menguji pengaruh signifikan PDRB, Pendidikan dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022
5. Untuk menguji pengaruh signifikan PDRB terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022
6. Untuk menguji pengaruh signifikan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022
7. Untuk menguji pengaruh signifikan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang terkait atau membutuhkan informasi dan data yang terkait dengan penelitian ini.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan literasi kepada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan informasi yang berhubungan dengan pengaruh PDRB, tingkat Pendidikan dan tenaga kerja terhadap kemiskinan dengan inflasi sebagai variabel intervening di perkotaan Jawa Timur pada tahun 2018-2022.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi di ruang lingkup wilayah yang diteliti.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya agar mampu menganalisis khususnya yang terkait dengan pengaruh dengan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, tingkat Pendidikan dan tenaga kerja

terhadap kemiskinan dengan inflasi sebagai *variable intervening* di perkotaan Jawa Timur pada tahun 2018-2022.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Variabel *dependen* (variabel terikat) yaitu tingkat kemiskinan (Y).
- b. Variabel *independen* (variabel bebas) yaitu PDRB (X_1), Pendidikan (X_2) dan tenaga kerja (X_3).
- c. Variabel *Intervening* (Inflasi)

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan dan untuk menghindari dari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada studi ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan penelitian yakni adalah, Penelitian ini berfokus pada beberapa wilayah yang mencakup wilayah perkotaan yang ada di Provinsi Jawa Timur

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca dapat memahami alur dari penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pendahuluan memuat alasan peneliti mengangkat tema dan masalah yang akan diteliti nantinya.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori atas variabel kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, tenaga kerja dan inflasi kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang suatu pendekatan penelitian dan jenis penelitian, yang memuat populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan metode penelitian yang digunakan.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari paparan data berisi hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pengujian hipotesis dari temuan penelitian yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Inflasi sebagai Variabel Intervening di Perkotaan Jawa Timur Tahun 2018 -2022”

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

6. BAB VI

Dalam bab ini, penulis memaparkan bagian akhir berupa kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai *poverty* atau *poor* yang berasal dari kata Latin "*pauper*" yang berarti miskin atau kekurangan. Para ahli mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana sumber penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi yang lebih buruk terjadi ketika kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pakaian yang layak, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk efisiensi kerja tidak dapat dipenuhi atau kurang.⁷

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup secara layak. Garis kemiskinan adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan seseorang, seperti tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Beberapa alat ukur kemiskinan yang lazim digunakan adalah pendapatan, kondisi hidup, dan indeks pengeluaran. Pendapatan membandingkan pendapatan individu dengan garis kemiskinan yang telah ditetapkan, kondisi hidup mengamati kondisi lingkungan fisik, sosial, dan kesehatan individu, sedangkan indeks pengeluaran menghitung total pengeluaran individu⁸

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan

⁷ Alex Riki dan Janner Simarmata, (ed), *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) , hlm. 66

⁸ Josep, *Konsep dan strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Indocamp), 2018, hlm. 7-8

kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁹

Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.¹⁰ Kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan, kebutuhan pokok, dan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US\$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari (kurs Rp 15.230 per US\$).

Kemiskinan terjadi akibat suatu hubungan berkesinambungan antara kondisi masyarakat yang tergolong terbelakang dan sumber daya alam yang belum dikembangkan. Sumber daya alam tersebut agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam mengolah dan memanfaatkan SDA menjadi barang yang memiliki nilai guna tinggi. Kaitannya dengan masalah masalah kemiskinan, bahwasannya Sumber Daya Manusia masih belum sepenuhnya berkembang dan memiliki potensi yang maksimal, ini diakibatkan Sumber Daya Manusia yang belum berkembang yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

2. Teori Lingkaran Kemiskinan

Teori kemiskinan didasarkan atas teori lingkaran setan kemiskinan dimana terjadi karena kondisi pasar yang jauh dari kata sempurna, modal terbatas, dan sumber daya manusia rendah. Nurkse

⁹ Amir Machmud, "*Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*", (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 280-281

¹⁰ Khomsan, *Indikator Kemiskinan*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), hlm. 45

(dalam Kuncoro, 2006) menggambarkan dalam teori lingkaran kemiskinan bahwa keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan sektor perekonomian menjadi melambat, dalam hal ini sektor perekonomian dalam suatu wilayah menjadi sangat penting dikarenakan jumlah dari keseluruhan sektor perekonomian dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)¹¹

Rendahnya produktivitas manusia akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima, dalam hal ini tingkat tenaga kerja dalam suatu wilayah yang menjadi salah satu indikator dalam penyebab tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berakibat pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi bisa berupa investasi sumber daya manusia yaitu dengan ukuran pendidikan, maupun investasi kapital dengan ukuran konsumsi.¹² Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan yang salah satu indikatornya adalah tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi atau sektor perekonomian yang berindikasi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3. Bentuk Bentuk Kemiskinan

Bentuk kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 bentuk yakni¹³:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki pendapatan namun jumlah pendapat tersebut berada dibawah garis kemiskian, atau jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya. Baik

¹¹ Muhammad Nuh, *Kebijakan Pembangunan di Perkotaan*, (Malang:UB Press, 2017), hlm.52

¹² Rudy Susanto dan Indah Pangesti. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta" *Journal of Applied Business and Economic* Vol. 5 No. 4 (Juni 2019) hlm. 340-350

¹³ A. Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Missklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta:Fakultas Ekologi Manuia IPB, 2015), hlm.3

kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan kesehatan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pendidikan dan pengeluaran konsumsi lainnya.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan pendapatan yang lainnya. Dengan kata lain kemiskinan relatif dapat diartikan suatu keadaan dimana terjadi ketimpangan pendapatan atau sebenarnya keadaannya sudah di atas garis kemiskinan namun kemampuannya masih di bawah masyarakat sekitarnya. Keadaan ini disebabkan oleh pihak pemerintah yang telah melakukan pembangunan ekonomi namun pengaruh dari kebijakan tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini terjadi karena faktor dari dalam diri seorang individu, baik disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup tberkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Dalam hal ini tidak terdapat usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi individu meskipun kondisi lingkungan yang mendukung. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan bahwa kelompok masyarakat ini miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lainnya

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia itu sendiri seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan sekelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural dengan

direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang dan pemilikan sumber daya tidak merata menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak maksimal. Sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Hal ini disebut “*accidental poverty*”, yaitu kemiskinan yang terjadi karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan struktural juga terjadi akibat dari tatanan organisasi dalam suatu daerah yang dirasa tidak mendukung perekonomian masyarakat seseorang, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk meningkatkan perekonomiannya.

4. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi menjadi beberapa dimensi penyebab kemiskinan¹⁴ :

a. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan

Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat

¹⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman : Deepublish, 2017) hlm. 12-13

dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.

c. Kemiskinan sosial

Melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut, kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

d. Kemiskinan konsekuensial.

Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

5. Menghitung Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan ada beberapa ukuran atau indeks yang sering digunakan para ahli dalam penelitian empiris, diantaranya adalah Foster Greer Thorbecke (1984)

- a. *Poverty headcount index* (P0) yang merupakan suatu ukuran kasar dari kemiskinan karena hanya melihat pada proporsi dari penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, ukuran ini hanya menjumlahkan berapa banyak orang miskin yang ada dalam perekonomian, selanjutnya dibuat persentasenya terhadap total penduduk;
- b. *Poverty Gap Index* (P1) yang mengukur kedalaman kemiskinan didalam suatu wilayah. Indeks ini mengestimasi jarak atau perbedaan rata-rata pendapatan

orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut, dan

- c. *Squared poverty gap* (P2) yang menunjukkan keparahan kemiskinan dalam suatu wilayah. Secara sederhana indeks P2 dapat didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat kesenjangan kemiskinan (*squared poverty gap*). Ukuran P2 telah mempertimbangkan kepelikan kemiskinan (*severity of poverty*) di dalam suatu wilayah dan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin tersebut. Oleh karena itu indeks ini sering juga disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*)¹⁵

Menghitung tingkat kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan, BPS menggunakan formula sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Di mana:

P0 = Tingkat persentase kemiskinan.

Z = Garis kemiskinan.

Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i < z$.

Q = Banyaknya penduduk yang di bawah garis kemiskinan.

N = Jumlah kemiskinan.

Sedangkan untuk menghitung garis kemiskinan, BPS menggunakan formula sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Di mana:

GK = Garis kemiskinan.

GKM = Garis kemiskinan makanan.

¹⁵ Prof. Dr. Henry J.D. Tamboto, M.Si, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2019) hlm. 34-35

GKNM = Garis kemiskinan non makanan.¹⁶

Pengukuran angka kemiskinan dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut:¹⁷

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mengukur pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling esensial-lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks tersebut dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.
- b. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Mengukur dimensi yang berlawanan arah dari IPM, yaitu seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal (*deprived people*), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut dihitung menggunakan prosentase penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun, prosentase penduduk buta huruf, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin tinggi.
- c. Indeks Kehidupan Fakir Miskin Mengukur kesenjangan pencapaian, yaitu berapa upaya, dalam prosentase, yang masih harus dilakukan/dicapai untuk membawa kondisi kehidupan fakir miskin di suatu wilayah menuju standar kehidupan minimum yang layak.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah total nilai atau harga pasar (*market place*) dari seluruh barang dan jasa akhir (*final goods*)

¹⁶ <https://bps.go.id>. Diakses pada 16 Januari 2024

¹⁷ Prof. Dr. Henry J.D.Tamboto, M.Si, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2019)hlm. 37-38

and service) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.¹⁸

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari hasil produksi nilai barang dan jasa yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku, pada suatu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, di mana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.¹⁹

(Hermanto Siregar 2010) mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan terwujud jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih banyak dihasilkan dari partisipasi ekonomi penduduk miskin. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin mengecil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat di masing-masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan

2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemiskinan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengurangi tingkat kemiskinan apabila semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan bahwa semakin meningkat pula produksi suatu wilayah tersebut, tingginya tingkat Produk Domestik

¹⁸ Rapika Kesatriani Damanik, et. all, “*Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provisisi Sumut*”, Jurnal Darma Agung Vol 28, No 3, 2020, hlm.363

¹⁹ Rudi Hartono, et. all, “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja*”, Jurnal Inovasi, Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 38

Regional Bruto (PDRB) biasanya diiringi makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat, yang berindikasi pada jumlah tingkat kemiskinan yang menurun.²⁰

Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan laju pertumbuhan produk nasional bruto berdasarkan harga konstan yang dapat meningkatkan barang dan jasa yang dicapai wilayah cocok untuk kegiatan ekonomi. Tingkat pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan perkiraan tingkat pertumbuhan rata-rata berdasarkan pertumbuhan semua sektor. Pada saat yang sama, Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya mata rantai ekonomi dan peran sektor ekonomi. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin besar pula kekuatan *open source* wilayah tersebut. Pada kenyataannya, Produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi seluruh angkatan kerja dengan memperkirakan bahwa ketika nilai Produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, nilai tambah terhadap hasil sektor ekonomi seluruh wilayah akan meningkat.²¹

Teori pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, serta John Stuart Mill. Menurut teori ini suatu pertumbuhan ekonomi/pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan suatu kekayaan alam semesta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatian pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka mengasumsikan luas suatu tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk ini disebut dengan teori penduduk optimal. Pada teori ini, awal mulanya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kenaikan suatu pendapatan perkapita. Namun jika suatu jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi suatu

²⁰ Abdul Rahman dan Abdurrozaq Hasibuan, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kota Padangsidempuan" Buletin Utama Vol. 17, No. 1, 2021.

²¹ Aulia Nur Azizah , Binti Nur Asiyah "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur" Sibatik Journal, Vol.1 (2022).

fungsi produksi yaitu, produksi marginal akan mengalami suatu penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada suatu keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang sangat maksimal, apabila jumlah suatu penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.²²

Teori pertumbuhan Keynesian mengusulkan bahwa permintaan agregat (AD) adalah penentu pertumbuhan ekonomi, yang meliputi permintaan dan kemampuan untuk membayar permintaan jasa dan barang dalam perekonomian.

3. Cara Penghitungan dan Penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Cara penghitungan PDRB terdapat 3 pendekatan yaitu :²³

1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Pengangkutan dan Komunikasi
- h) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

²² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses.....*, hlm. 236.

²³ BPS Jawa Timur, Diakses Maret 2024

2) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- 2) pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) perubahan inventori, dan
- 5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

b. Penyajian PDRB

- 1) PDRB atas dasar harga yang berlaku merupakan penghitungan nilai tamba jasa maupun produk melalui harga di setiap tahunnya.

Bentuk ini dipakai untuk menunjukkan perubahan dan struktur ekonomi

- 2) PDRB atas dasar harga konstan memperlihatkan nilai tambah jasa maupun produk yang dihitung melalui harga dari tahun terpilih sebagai tahun dasar. Bentuk ini dipakai untuk menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian riil setiap warsa, dimana telah dikeluarnya faktor perubahan harga.

4. Uraian PDRB menurut lapangan pekerjaan

Uraian sektoral mencakup ruang lingkup dan konsep dfinisi dari setiap sektor dan subsector, cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan.²⁴

a. Sektor pertanian

- 1) Tanaman bahan makanan, subsector mencakup tanaman bahan makanan dan hasil-hasil pengolahan secara sederhana oleh petani,
- 2) Tanaman perkebunan, subsector tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar.
- 3) Peternakan dan hasil-hasilnya, subsector mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasilhasil ternak.
- 4) Kehutanan, subsector mencakup kegiatan di area hutan oleh peroragan dan badan usaha.
- 5) Perikanan, mencakup seluruh kegiatan penangkapan dan pengambilan serta budisaya laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah mina dan keramba.

b. Sektor pertambangan dan penggalian Mencakup kegiatan pertambangan, penggaian, pengeboran, penyaringan, dan pengambilan pemanfaatan segala macam benda non biologis.

c. Sektor industri pengolahan Mencakup kegiatan untuk mengubah atau mengolah barang organik dan anorganik dengan tangan ataupun mesin menjadi barang baru dengan nilai lebih tinggi.

²⁴ Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2008-2012, hlm. 9-23

- d. Sektor listrik, gas dan air bersih
 - 1) Listrik, subsector mencakup semua kegiatan kelistrikan. PLN
 - 2) Gas, komoditas subsector adalah gas produksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
 - 3) Air bersih, subsector mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum.
- e. Sektor konstruksi Semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi dan sebagainya.
- f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
 - 1) Perdagangan besar dan eceran. Perhitungan nilai tambah subsector perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang (*commodity flow*).
 - 2) Hotel, subsector mencakup seluruh hotel baik berbintang maupun tidak dan berbagai jenis penginapan lainnya.
 - 3) Restoran
- g. Sektor pengangkutan dan komunikasi
 - 1) Angkutan kereta api
 - 2) Angkutan jalan raya
 - 3) Angkutan laut/air
 - 4) Angkutan udara
 - 5) Jasa penunjang angkutan - Terminal dan perpakiran - Bongkar / muat - Ekspedisi dan keagenan – Pergudangan
 - 6) Komunikasi, mencakup jasa pos giro dan telekomunikasi.
- h. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
 - 1) Bank
 - 2) Lembaga keuangan bukan bank
 - 3) Jasa penunjang keuangan
 - 4) Sewa bangunan
 - 5) Jasa perusahaan
- i. Sektor jasa-jasa
 - 1) Jasa pemerintahan umum

- 2) Jasa sosial dan kemasyarakatan - Jasa pendidikan - Jasa kesehatan - Jasa sosial dan kemasyarakata lainnya
- 3) Jasa hiburan dan kebudayaan
- 4) Jasa perorangan dan rumah tangga

C. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Secara harfiah, pendidikan berasal dari kata latin *educare*, yang berarti mengeluarkan suatu kemampuan adalah keluar dan *ducare* berarti memimpin. Jadi, *educare* yaitu membimbing untuk mengeluarkan kemampuan yang tersimpan dalam diri untuk tercapai kedewasaan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *education*, artinya pendidikan terkait dengan pendidikan di sekolah karena sekolah adalah tempat seseorang dapat dididik oleh pendidik secara formal. Sehingga jika kedua pengertian tersebut dihubungkan, pendidikan adalah proses komunikasi atau interaksi antar manusia dewasa dengan manusia yang belum dewasa untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik dan diakui keberadaannya. Tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan karena pendidikan merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, yang mana dalam jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan²⁶

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sebagai modal manusia merupakan komponen

²⁵ Dwi Nugroho Hidayanto, Dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 3.

²⁶ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), hlm. 413

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas negara karena merupakan sarana masyarakat untuk menjadi lebih cakap dan terampil. Sehingga dengan keterampilan ini, masyarakat dapat menghasilkan output lebih banyak dan memperbaiki perekonomian.²⁷

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan pada masyarakat adalah dengan rata – rata lama sekolah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan.

Dari batasan diatas maka tingkat pendidikan adalah kegiatan individu dalam pembelajaran yang diukur dari rata-rata lama sekolah yakni banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang menjalani pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SLTA selama 3 tahun, DIII selama 3 tahun, S1 selama 4 tahun, S2 selama 2 tahun dan S3 selama 3 tahun terhadap pendidikan yang terakhir ditamatkan yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

2. Fungsi Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan, baik sebagai individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban serta watak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan rtujuan untuk mengembangkan potensi seseorang menjadi

²⁷ Julita Senewe, Dkk “ Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur, Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.23,2023 hlm. 394

pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, cakap, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab²⁸

Fungsi pendidikan kepada masyarakat terbagi kedalam dua bagian besar, yakni fungsi preserveratif dan fungsi direktif. Fungsi preserveratif dilakukan dengan pelestarian tata sosial dan tata nilai yang terdapat dalam masyarakat, sedangkan fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaruan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Selain itu pendidikan juga berfungsi untuk menyiapkan sebagai manusia, menyiapkan sebagai tenaga kerja, serta menyiapkan menjadi warga negara yang baik. Dalam suatu lembaga pendidikan formal diperlukan adanya suatu sistem yang teratur dan terencana berdasarkan pedoman yang baku, tanpa suatu sistem yang teratur maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mencapai kesejahteraan hidup.²⁹

3. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan jika mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya dapat memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.³⁰

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

²⁸ UU No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁹ Dwi Nugroho Hidayanto, dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 4

³⁰ Rudy Susanto dan Indah Pangesti. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta" *Journal of Applied Business and Economic* Vol. 5 No. 4 (Juni 2019) hlm. 340-350

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan menjadi sangat besar dikarenakan pendidikan diharapkan mampu memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dapat memperbesar peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak sehingga mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia.

Pendidikan memberikan individu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja dengan lebih baik. Dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar lebih tinggi dan memberikan jaminan keamanan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga membuka akses ke peluang pekerjaan yang lebih beragam, termasuk pekerjaan di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus. Selain aspek ekonomi, pendidikan juga dapat meningkatkan kapasitas individu untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan, gizi, dan pola hidup sehat secara keseluruhan

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, masyarakat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, termasuk hak akses terhadap layanan kesehatan dan sosial. Pendidikan juga dapat berfungsi sebagai kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Generasi yang mendapatkan pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pendidikan yang serupa kepada anak-anak mereka, menciptakan efek positif yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya investasi dalam peningkatan kapasitas individu, tetapi juga investasi dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.³¹

Dalam teori Marjinal dari Lewis, Teori ini menganggap bahwa kemiskinan diperkotaan terjadi disebabkan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Konsep

³¹ Elita Solin,dkk." *Analisis Pengaruh PDRB,Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pakpak Bharat*" Musytari,Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 1 No 12,2023.

Lewis yang terkenal mengatakan ”*Cuilture of Poverty*”. Menurut Lewis masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter, apatis, kurang usaha, hanya menyerah pada nasib, sistem keuangan yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang mabisi untuk membangun masa depan, kesejahteraan dan kekerasan banyak terjadi.³²

D. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pasal 2 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat³³

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 15 tahun keatas tergolong tenaga kerja.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang termasuk tenaga kerja adalah sebagaimana bagan di bawah ini:

³² Sadono Sukirno Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2006).

³³ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktis di Indonesia Edisi Pertama, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 1

³⁴ Badan Pusat Statistik, diakses pada Maret, 2024

Gambar 2.1
Bagan Tenaga Kerja



Sumber: Buku Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktis di Indonesia Edisi
Pertama

Keterangan:

- 1) **Tenaga kerja:** Penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
- 2) **Angkatan kerja:** Menurut Sumarsono angkatan kerja (*labor force*) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan.³⁵ Angkatan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa definisi yaitu angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Selain itu angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan³⁶

³⁵ Sofia Jahnatul Isnaini, dkk. "Analisis Determinan Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2018", Jurnal GeoEkonomi, Vol 11 No 2, 2020, hlm. 181

³⁶ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014), hlm. 6.

- 3) **Bukan Angkatan kerja:** Penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga) serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima santunan).
- 4) **Bekerja:** Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam.
- 5) **Pengurus rumah tangga:** dalam hal ini, bisa termasuk ibu rumah tangga, yang kadang kala ada yang mempunyai pekerjaan formal maupun informal, dan kadang kala ada juga yang tidak bekerja, namun hanya mengurus rumah tangga. Dan juga yang termasuk disini adalah pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga yang belum terlindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003.
- 6) **Pengangguran:** mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini terdiri atas:
 - a. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan
 - b. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha
 - c. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
 - d. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja³⁷

Dari bagan di atas, sudah jelas bahwa yang tergolong tenaga kerja mencakup aspek yang sangat luas sekali. Golongan Angkatan kerja yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri atau yang bekerja dalam instansi pemerintahan, dan yang bekerja di sektor swasta (non-pemerintahan). Tenaga kerja (Angkatan kerja) yang bekerja di sektor pemerintahan dilindungi atau diatur dalam hukum kepegawaian dan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3

tenaga kerja (Angkatan kerja) yang bekerja di sektor swasta selama ini diatur dalam hukum perburuhan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang mampu menghasilkan suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan minimal usia 15 tahun sampai dengan batas maksimal 64 tahun dan dalam hal ini berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan kemiskinan sangatlah erat dikarenakan semakin tingginya jumlah tenaga kerja juga jumlah pendapatan akan semakin tinggi dan mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

2. Macam Macam Tenaga Kerja

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu:

- 1) Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
- 2) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan
- 3) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu.

3. Hubungan tenaga kerja dan kemiskinan

Tenaga kerja dapat mengurangi kemiskinan jika, dilihat dari aspek kualitas pertumbuhan penduduk yang mana pertumbuhan penduduk dapat berakibat positif apabila pertumbuhannya mendorong pembangunan ekonomi, artinya kenaikan jumlah penduduk dapat

memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang mampu mendorong sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian³⁸

Dalam teori yang dikemukakan oleh Aissyaibani bahwa penduduk yang bekerja dan mengisi sektor perekonomian yang tersedia merupakan salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhannya dengan penghasilan yang diperoleh. Dari teori tersebut secara tidak langsung tenaga kerja yang produktif dan memiliki pekerjaan dapat diasumsikan sebagai salah satu faktor yang dapat menekan angka kemiskinan. Tingginya kontribusi penduduk yang bekerja juga dalam menekan kemiskinan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk memperluas lapangan pekerjaan sebagai upaya potensial untuk mengurangi penduduk miskin.

Sedangkan dalam teori yang dikemukakan oleh Nallari dan Griffith tingkat kemiskinan dapat direduksi melalui lapangan pekerjaan yang luas. Indikasi lapangan pekerjaan yang luas ini dapat memberikan peluang yang besar bagi tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi sektor ekonomi yang tersedia dan menambah penghasilan.³⁹

Teori pertumbuhan Neo Klasik yang dikembangkan oleh Robert M. Solow dan T. W. Swan. Dalam modal Solow-Swan ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan suatu model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substansi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan ini, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan oleh kemungkinan substansi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam sebuah rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan ini melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangannya, sehingga pemerintah tidak

³⁸ Rudy Susanto dan Indah Pangesti. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Dki Jakarta” *Journal of Applied Business and Economic* Vol. 5 No. 4 ,2019 hlm. 340-350

³⁹ Erika Yustitia dkk, “Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta Periode 2011 – 2020” *Jurnal MAPS* Vol. 6 No. 1 2022,hlm.49-50

perlu terlalu banyak mencampuri maupun mempengaruhi pasar. Suatu campuran tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan ini berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya suatu penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill ataupun kemajuan teknik, sehingga produktivitas *Capital* meningkat. Dalam model ini, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari suatu waktu.⁴⁰

Nurkse menyampaikan masalah rendahnya investasi menyebabkan akumulasi modal yang rendah sehingga proses tersedianya lapangan pekerjaan menjadi rendah dan rendahnya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dalam lapangan kerja menjadi sedikit atau banyak masyarakat yang menganggur sehingga kemiskinan menjadi meningkat. Penyerapan tenaga kerja disini yaitu sebuah situasi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Tenaga kerja yang terserap adalah terisinya jumlah lapangan kerja, yang tecermin dari tingginya pertumbuhan penduduk yang bekerja. Penyerapan penduduk yang bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja⁴¹

E. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Menurut ahli moneter inflasi adalah gejala jumlah uang yang diminta akan mendorong kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa.⁴² Inflasi adalah suatu persoalan ekonomi yang umumnya terjadi pada perekonomian suatu negara. Persoalan inflasi kerap dijadikan komoditas

⁴⁰ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Volume 1* dari *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 428

⁴¹ Ayu Salsabilla, dkk, “ Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Ikraith-Ekonomika* No 2 Vol 5, 2022.

⁴² Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019) hlm. 5-6

politik. Sebuah pemerintahan dapat dianggap gagal apabila tak mampu mengatasi inflasi yang tinggi dan mengganggu jalannya perekonomian. Terdapat tiga komponen bisa dikatakan terjadi inflasi, yaitu:

- a) Kenaikan harga suatu komoditas bisa dikatakan naik bila harga saat ini lebih tinggi dibandingkan harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu perhari, perminggu, perbulan, triwulan, pertahun.
- b) Bersifat umum Kenaikan harga suatu komoditas dikatakan inflasi jika kenaikan harga tersebut menyebabkan harga-harga secara umum naik atau naiknya harga komoditas pokok yang memiliki dampak terhadap stabilitas harga hingga mempengaruhi harga komoditas lain. Misalnya harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi harga barang-barang lain sebab BBM merupakan komoditas strategis.
- c) Berlangsung terus-menerus Dikatakan terjadi inflasi jika kenaikan harga tersebut terjadi secara terus-menerus, jika kenaikan harga yang bersifat umum hanya terjadi sementara maka belum bisa dikatakan inflasi, sebab rentang waktu perhitungan inflasi minimal bulanan. Dalam sebulan dapat dilihat apakah kenaikan harga yang bersifat umum dan terjadi terus-menerus, selain itu juga rentang waktu perhitungan yang lebih panjang seperti triwulan dan tahunan.⁴³

2. Teori Inflasi

Secara garis besar, teori mengenai inflasi dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu mereka yang menganut paham monetaris dan paham non monetaris.⁴⁴

a) Teori Monetarist (*Classical Theory on Inflation*)

Teori klasik menganut paham monetaris. Teori ini menyatakan bahwa penawaran (*supply*) uang atau jumlah

⁴³ Ida Musdafiah, Irawan Budianto, *Mengenal Lintas Ilmu Ekonomi*, (Tangerang: Indigo Media, 2023) hlm. 89-90

⁴⁴ G.A Diah Utari, dkk, *Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya* (Jakarta: BI Institute, 2016) hlm. 8

uang beredar dalam perekonomian memiliki hubungan langsung dengan perubahan tingkat harga. Peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong tingkat harga bergerak ke atas, demikian pula sebaliknya. Dengan alasan inilah Teori Klasik disebut juga dengan Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory Of Money*). Secara lebih spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan dari interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari uang. Apabila tingkat harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada tingkat harga keseimbangan, maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat jumlahnya persis sama dengan tingkat kuantitas uang yang diedarkan oleh bank sentral.

b) Teori Non Monetarist

Pandangan yang berbeda dari konsep monetaris dapat digolongkan di antaranya adalah *Structuralist Theory* dan *Post Keynesian Theory*. Berbeda dengan teori klasik mengenai inflasi, teori strukturalis meyakini bahwa inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang. Penyebab inflasi berasal dari struktur perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi dengan cepat perkembangan perekonomian. Teori ini menunjukkan bahwa inflasi

bukan semata-mata fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural.

c) Teori Permintaan (John Maynard Keynes)

Keynes menjelaskan bahwa inflasi dapat muncul ketika permintaan agregat (total permintaan dalam ekonomi) melebihi penawaran agregat (total produksi). Ini bisa disebabkan oleh peningkatan belanja konsumen atau investasi. Teori permintaan merujuk pada kerangka konseptual yang digunakan dalam ekonomi untuk menjelaskan bagaimana harga suatu barang atau jasa, preferensi konsumen, pendapatan, dan faktor-faktor lain memengaruhi sejauh mana konsumen ingin membeli barang atau jasa. Teori konsumen menjelaskan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah yang akan dibeli oleh konsumen, dengan asumsi bahwa semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang diminta.⁴⁵

3. Macam Macam Inflasi

Tingkat kualitas inflasi dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:⁴⁶

a. Berdasarkan Tingkat Kualitas :

1) Inflasi ringan

Tingkat inflasi kurang dari 10% pertahun, sehingga disebut juga inflasi di bawah dua digit. Sifat inflasi ini sesuai dengan inflasi merayap (creeping inflation) dan memberikan dampak baik pada perekonomian. Dalam beberapa hal justru memberikan dorongan bai pengusaha untuk lebih bergairah dalam berproduksi karena adanya dorongan kenaikan harga di pasar.

⁴⁵ Henry Sarwono dan Danang Sunyato, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Jakarta: CAPS, 2020), hlm. 78.

⁴⁶ Imamudin Yuliadi, Ekonomi Moneter, (Jakarta: PT INDEKS, 2008) hlm.75

2) Inflasi sedang

Tingkat inflasi bergerak antara 10%-30% pertahun. Pengaruh yang ditimbulkan cukup dirasakan terutama masyarakat yang berpenghasilam tetap seperti pegawai negeri dan pegawai lepas.

3) Inflasi tinggi

Laju inflasi 30%-100% pertahun. Inflasi tinggi terjadi pada keadaan politik yang tidak stabil dan menghadapi krisis yang berkepanjangan. Efek yang ditimbulkan menyebabkan mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi seperti perbankan. Aktivitas kredit, asuransi, proses produksi dan distrsibusi barang mengalami guncangan karena msyarakat lebih mengambil sikap aman dengan memegang barang daripada uang.

4) Hiperinflasi

Dalam ilmu ekonomi, hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, yaitu situasi di mana harga naik terlalu cepat dan nilai uang turun drastis.⁴⁷

b. Berdasarkan Penyebab Inflasi⁴⁸1) Inflasi tarikan permintaan (*demand full inflation*)

Inflasi yang disebabkan oleh banyaknya permintaan. Biasanya terjadi pada perekonomian yang berkembang dengan pesat. Tingginya kesempatan kerja akan membuat peningkatan jumlah pendapatan yang tinggi nantinya akan memimbulkan pengeluaran barang dan jasa yang berlebihan. Kelebihan pengeluaran ini yang menyebabkan inflasi.

⁴⁷ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019) hlm. 20

2) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*)

Disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Meningkatnya biaya produksi di pasar factor produksi sehingga akan menaikkan harga komoditas di pasar komoditas. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Misalnya kenaikan tingkat upah, kenaikan biaya bahan baku, dan kenaikan harga BBM. Sehingga, jika permintaan mmenurun akibatnya jumlah produksi ikut menurun, sehingga permintaan terhadap bahan baku sebagai faktor produksi juga ikut turun.

3) Inflasi Berdasarkan Asalnya

a) Inflasi dari dalam negeri

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi akibat kesalahan pengelolaan perekonomian baik sektor riil maupun sektor moneter.

b) Inflasi dari macanegara

Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang harganya naik memiliki peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

4. Penyebab dan Dampak Inflasi

a. Penyebab Inflasi

Inflasi di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa factor sebagai berikut:

1) Jumlah uang beredar

Jumlah peredaran uang yang berlebih akan menurunkan nilai dari mata uang dan daya beli mata uang

tersebut menjadi lemah, sehingga perlu di atur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

2) Defisit anggaran belanja pemerintah

Defisit anggaran belanja terutama disebabkan oleh permasalahan yang terikat dengan kekuatan struktural ekonomi Indonesia, yang terkadang mengakibatkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan pembangunan.

3) Faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri

Penawaran agregat dan luar negeri dapat mengalami kelambatan penyesuaian terhadap peningkatan permintaan agregat yang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural (*structural bottleneck*) yang ada di Indonesia.

b. Dampak Inflasi

Secara umum dampak dari inflasi yang tinggi dan tidak stabil adalah: ⁴⁹

1) Penurunan daya beli (*purchasing power*)

Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli karena nilai uang yang semakin rendah. Dengan nilai uang yang sama, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli akan berkurang jumlahnya. Dampak penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi tidak sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan rendah adalah yang paling dirugikan akibat inflasi. Apabila hal ini dibiarkan dapat menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya aksi buruh untuk kenaikan upah dan meningkatnya kemiskinan.

⁴⁹ G.A Diah Utari, dkk, *Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya* (Jakarta: BI Institute, 2016) hlm.8

2) Kondisi ketidakpastian

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Masyarakat akan kesulitan untuk menentukan alokasi dananya. Masyarakat cenderung menyimpan dananya dalam bentuk aset fisik dibandingkan tabungan di bank. Oleh karenanya, inflasi mengurangi insentif untuk menabung. Bagi dunia usaha, inflasi yang tinggi akan mengurangi insentif untuk investasi, karena ketidakpastian akan profit dan biaya di masa depan. Kondisi ketidakpastian ini dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

3) Berkurangnya daya saing produk nasional

Inflasi yang tinggi membuat biaya produksi juga tinggi sehingga barang produksi nasional menjadi tidak kompetitif, baik untuk dikonsumsi dalam negeri maupun diekspor. Hal ini akan mendorong peningkatan impor yang akan berpengaruh terhadap performa neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Salah satu yang dijadikan sebagai acuan melakukan sesuatu penelitian yang menjadikan penulis untuk dapat memperluas teori yang akan digunakan Dalam hal ini, penulis akan menguraikan penelitian sebelumnya untuk dijadikan acuan sebagai pendukung dari penelitian ini.

Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan :

1. Hasil uji analisis oleh Aulia Nur Azizah dan Binti Nur Asiyah⁵⁰ yang bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pengangguran terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁵⁰ Aulia Nur Azizah , Binti Nur Asiyah, “*Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*” dalam Sibatik Jurnal Vol. 1 No 12, 2022.

regresi data panel dengan data pada tahun 2017-2021 dengan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel PDRB dan kemiskinan serta tujuan yang sama yakni ingin meneliti bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan di Jawa Timur

2. Hasil uji analisis dari Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari⁵¹ yang bertujuan untuk menguji dan memverifikasi apakah salah satu variabel yang diteliti yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan kontribusi pada kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2017. Penelitian ini bersifat asosiatif karena bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian. Data penelitian diambil dari situs online Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode regresi dengan data panel dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews. Hasil dari penelitian ini adalah Pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan pengangguran. Laju PDRB mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan. Laju PDRB memiliki konstanta bernilai positif yang menunjukkan terdapat hubungan searah antara laju PDRB dengan kemiskinan sehingga semakin tinggi laju PDRB akan meningkatkan kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama menggunakan variabel PDRB dan kemiskinan, namun yang membedakan adalah cakupan luasan wilayah yang diteliti.

⁵¹ Lily Leonita, Rini Kurnia Sari "Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia" Jurnal ISOQUANT Vol. 3 No. 2, 2019.

3. Hasil uji analisis dari Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk⁵² yang bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008- 2017, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan strategi dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, data yang diolah untuk mendapatkan informasi tentang variabel yang diteliti yaitu data sekunder oleh BPS (Badan Pusat Statistika). Sedangkan analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diolah menggunakan SPSS 24. Hasil regresi yang diperoleh dari data yang diolah menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2013. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -2,368, artinya apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,368 persen. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah variabel X yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Y yaitu kemiskinan dengan data tahun ke tahun.
4. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Solin, Irda, Fazira dan Ratiwi⁵³ yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak parsial dan simultan variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier, dan analisis dilakukan menggunakan aplikasi Eviews. Sumber data pada penelitian ini termasuk data sekunder karena di dapat dari pihak lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Pakpak Bharat. Begitu juga dengan variabel Pendidikan

⁵² Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk” *Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*” Jurnal Darma Agung Vol.28, No 3, 2020.

⁵³ Elita Solin et,al. “*Analisis Pengaruh ,Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pakpak Bharat dalam Neraca Manajemen*”, Ekonomi Vol 1 No 12, 2023.

yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan untuk variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di kabupaten Pakpak Bharat. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni adalah data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS)

5. Hasil uji analisis dari Rinawati , Miftitah , Aldianto, Faj'ri, dan Sujianto⁵⁴ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap IPM di Jawa Timur pada tahun 2017-2021 baik secara parsial maupun simultan. Metode yang dipakai adalah Pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan data sekunder. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur dengan data cross section yang dikombinasikan dengan data time series atau yang biasa disebut sebagai data panel Dimana 38 Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa timur digunakan sebagai data cross section sedangkan untuk data time series menggunakan lima periode mulai dari 2017 sampai 2021. Jenis penelitian Teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa analisis regresi berganda data panel dengan bantuan perangkat Eviews 10. Hasil dari uji analisis ini adalah PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk masing-masing berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Dengan arah pengaruhnya yaitu apabila PDRB mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut juga dialami oleh IPM (positif), turunnya kemiskinan berdampak pada kenaikan IPM (negatif), dan apabila apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan maka IPM juga mengalami kenaikan (positif). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah variabel bebasnya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan perbedaannya adalah pada variabel kemiskinan dimana dalam penelitian terdahulu ini digunakan

⁵⁴ Yuni Rinawati, et.al. “Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021” dalam Jurnal EcoGen Universitas Negeri Padang Vol. 5 No. 4 2022.

sebagai variabel bebas sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah merupakan variabel terikat.

Pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan :

1. Hasil uji analisis oleh Randa dan Sentosa⁵⁵ yang bertujuan untuk melihat bagaimana kausalitas antara ketimpangan pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia dengan memakai data sekunder berupa data panel dari tahun 2011 hingga 2018. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dan kemiskinan tidak mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Indonesia, artinya bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara ketimpangan pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel Pendidikan dan bagaimana kausalitasnya terhadap kemiskinan yang menjadi salah satu fokus penelitian. Perbedaan yang ada adalah dalam penelitian ini juga membahas mengenai pendapatan sedangkan dalam penelitian yang akan diuji oleh peneliti mengenai tenaga kerja
2. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Subiyakto, Nurhayati dan Syafri⁵⁶ yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh investasi, kependudukan, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia. Metode analisis yang digunakan melibatkan pengambilan sampel dari 34 provinsi untuk menjalani proses analisis regresi, pengujian asumsi tradisional, dan pengujian hipotesis. Hasil dari uji analisis ini adalah Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaan antara uji analisis ini dan penulis adalah Pendidikan

⁵⁵ Nur Azmi Randa, Sri Ulfa Sentosa, "Analisis Kausalitas Antara Ketimpangan Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan" Volume 2, Nomor 1, 2020.

⁵⁶ Hane Andreanu Subiyakto, et al, "Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Kemiskinan, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2022", dalam Jurnal Neraca Ekonomi, 2023.

dan kemiskinan menjadi variabel bebas dan keduanya saling berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Persamaan yang ada yakni ruang lingkup penelitian yang menggunakan satuan wilayah dan data tahun yang diteliti.

3. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Alwi, Syaparuddin, dan Hardiani⁵⁷ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi dengan data tahun 2004 –2018. Dengan metode Pengolahan data menggunakan software SPSS. 22 dan alat uji analisa data menggunakan *Path Analysis* (Analisa Jalur). Hasil dari uji analisis ini adalah didapatkan beberapa poin diantaranya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengangguran , pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kemsikinan di Provinsi Jambi pada tahun 2004-2018. Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2004-2018 dan pengangguran merupakan variabel intervening antara pertumbuhan ekonomi ke kemiskinan karena variabel pengangguran menambah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakuka peneliti adalah menggunakan variabel intervening sebagai variabel perantara antar variabel terikat dan bebas, dan terdapat beberapa variabel yang sama yaitu kemiskinan dan Pendidikan.
4. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Jacobus, Kindangen, dan Walewangko⁵⁸ yang bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan kepemilikan aset terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang didapat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Kesehatan berpengaruh negatif

⁵⁷ Ahmad Afwan Ali, et,al” *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi 2004-2018*” dalam e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 10. No. 2, 2021.

⁵⁸ Elvira Handayani Jacobus, dkk. “ *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.3 ,2021.

signifikan terhadap kemiskinan. Kepemilikan aset berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien memiliki tanda negatif artinya ada pengaruh negatif antara pendidikan dengan kesehatan, semakin naik pendidikan maka semakin turun kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan variabel Pendidikan dan bagaimana hubungannya dengan tingkat kemiskinan pada usatu daerah/wilayah.

5. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Adam, Olilingo dan Santoso⁵⁹ yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kawasan Utara-utara. Metode regresi data panel periode 2011-2020 di 4 Kabupaten dengan menggunakan data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menemukan bahwa pendidikan dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Secara parsial rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan yang mengindikasikan setiap kenaikan rata-rata lama sekolah dapat menurunkan angka kemiskinan. Selain itu tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti setiap kenaikan angka pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pengujian pada variabel Pendidikan dan kemiskinan dan indicator dalam menilai tingkat Pendidikan adalah rata rata serta indeks lama sekolah / Pendidikan.

Pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan :

1. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Hidayat⁶⁰ yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja

⁵⁹ Deswita Adam, dkk. "Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utarautara" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No.1 2022.

⁶⁰ Taufik Hidayat," *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara*" Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, 2023.

Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara, dengan metode pengujian yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menganalisa pengaruh terhadap analisa data ini dilakukan dengan menggunakan *views*¹⁰. Hasil dari uji analisis ini adalah Dimana pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel bebas menggunakan tenaga kerja dan variabel terikat menggunakan kemiskinan, selain itu cakupan wilayah penelitian adalah satu provinsi namun dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil sampel di perkotaan di Jawa Timur.

2. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Prasetya dan Sumanto⁶¹ yang bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengangguran, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, serta mengetahui hubungan tingkat pengangguran dan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, dengan analisis jalur. Data dalam penelitian ini adalah data presentase kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, serta tenaga kerja di 38 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2011-2020. Hasil dalam penelitian ini adalah variabel tenaga kerja menunjukkan hubungan yang positif dan secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah indikator yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang akan dilakukan

⁶¹ Gabriella Megawati Prasetya, Agus Sumanto, " *Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi*" dalam KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19, 2022.

oleh peneliti adalah kemiskinan dengan inflasi sebagai variabel intervening

3. Uji analisis yang dilakukan oleh Salsabilla, Juliannisa dan triwahyuningtyas⁶² yang bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, upah minimum, penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk, upah minimum, penyerapan tenaga kerja berpengaruh sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah variabel tenaga kerja dengan salah satu indikator yakni tingkat penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah tertentu.
4. Uji analisis yang dilakukan oleh Elisabeth Sitanggang⁶³ yang bertujuan menguji dan menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Indonesia dan juga jurnal sebagai pendukung penelitian Hasil Regresi menunjukkan Koefisien Korelasi (R) diperoleh korelasi berganda sebesar $R=0.53$ atau sebesar 53% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan keeratan korelasi yang kuat antara variabel IPM dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Koefisien Determinasi (R^2) dari hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,06 atau 6% artinya 6% kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh IPM dan Tenaga Kerja. Sedangkan 94% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji t menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak memiliki

⁶² Ayu Salsabilla, dkk, “ Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta” Jurnal Ikraith-Ekonomika No 2 Vol 5, 2022.

⁶³ Dessy Chayani Elisabeth Sitanggang, ”Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara” CERMIN : Jurnal Penelitian, Vol 4, No 2,2020.

pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan variabel tenaga kerja dan bagaimana hubungannya dengan tingkat kemiskinan.

5. Uji analisis yang dilakukan oleh Risky, Kindangen dan Walewangko⁶⁴ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah investasi (PMDN dan PMA), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan, terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis time series sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Path. Hasil analisis menunjukkan investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan tenaga kerja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, akan tetapi tenaga kerja secara tidak langsung belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan variabel tenaga kerja dengan kemiskinan yang akan di uji bagaimana korelasi atau hubungan antar keduanya.

⁶⁴ Risky Pratama, Prof. Dr. Paulus Kindangen, Een N. Walewangko “*Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sulawesi Utara*” Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

Pengaruh PDRB, Pendidikan, Tenaga Kerja terhadap tingkat kemiskinan .

1. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Hasibuan, Rujiman, dan Sukardi⁶⁵ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama kurun waktu 2014-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini dilakukan pada 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan total observasi 204. Hasil *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM di Indonesia. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan kerangka konseptual PDRB, Pengangguran (Angkatan kerja), kemiskinan dan inflasi serta IPM yang didalamnya terdapat indikator pendidikan.
2. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Juardi, Ahmad, dan Iwang⁶⁶ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif, dalam Penelitian ini menggunakan data Times series yang dianalisis Model analisis data Regresi Linier berganda dengan menggunakan Program software SPSS. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan Jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel PDRB, Inflasi dan juga variabel tingkat kemiskinan.

⁶⁵ Lailan Syafrina Hasibuan, dkk, "Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia" dalam Jurnal Penelitian Pend. Soshum Vol. 5. No. 2, 2020

⁶⁶ Juardi, dkk., "Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan" Bulletin of Economic Studies, Vol.3 No1, 2023.

3. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Hardana, Nurhalimah, dan Efendi⁶⁷ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kondisi Ekonomi Makro yang meliputi : Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. time series. Dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa : Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tetapi Upah Minimum tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel Pendidikan dan inflasi yang dikorelasikan dengan variabel kemiskinan.
4. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Yusnafira, Nursini dan Fitrianti⁶⁸ yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan, variabel independen yang dilakukan adalah pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) dan Angkatan Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dan Angkatan Kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel

⁶⁷ Ali Hardana, dkk., "Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)" Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.1, No.4 , 2022.

⁶⁸ Andi Velia Yusnafira, dkk., "Analisis Kemiskinan Kabupaten Bone" Jurnal Mirai Management Vol. 8 ,2023.

- pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan PDRB harga konstan, Angkatan kerja yang termasuk didalamnya adalah tenaga kerja.
5. Hasi uji analisis yang dilakukan oleh Sipahutar, Anjelina,dkk ⁶⁹ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran (tenaga kerja), kemiskinan, inflasi dan konsumsi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Metode penelitian kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Sampel penelitian ini Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Hasil ialah Pengangguran (Tenaga Kerja) berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Kemiskinan dan konsumsi berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Pengangguran (Tenaga Kerja), kemiskinan, inflasi dan konsumsi berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan variabel PDRB, tenaga kerja, Pendidikan dan kemiskinan melalui inflasi.

Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi

1. Uji analisis yang dilakukan oleh Vega Sofie Kharisma Putri⁷⁰ yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai tukar, Produk Domestik Bruto terhadap ekspor dengan inflasi sebagai variabel intervening studi empiris pada ekspor komoditi tekstile di Indonesia tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data

⁶⁹ Tetty Tiurma Uli Sipahutar,dkk., “ *Pengaruh Pengangguran (Tenaga Kerja),Kemiskinan, Inflasi Dan Konsumsi Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019*” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)Vol. 5 No. 2, 2021.

⁷⁰ Vega Sofie Kharisma Putri, ” *Pengaruh Nilai Tukar Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Ekspor Textile Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening*” dalam Jurnal Unimma,2020

sekunder dengan teknik pengambilan sampel jenuh, sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 (12 bulan x 5 tahun). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menyebutkan variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap inflasi maupun ekspor, sedangkan variabel PDRB berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap inflasi dan ekspor. Variabel inflasi berpengaruh terhadap ekspor, variabel nilai tukar tidak berpengaruh tidak langsung terhadap ekspor melalui inflasi dan PDB berpengaruh tidak langsung terhadap ekspor melalui inflasi. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah rentan data yang diambil selama 5 tahun dan menggunakan variabel intervening inflasi .

2. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Wijaya, Istiqomah dan Arintoko⁷¹ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, PDRB dan IPM terhadap kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan data panel. Output regresi dengan model fixed effect menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan penggunaan variabel PDRB, dan kemiskinan dengan melalui variabel inflasi.
3. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Iwang dan Ahmad⁷² yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa indikator sosial dan ekonomi yang meliputi jumlah penduduk, pendidikan, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode analisis regresi

⁷¹ Hendry Wijaya, dkk.,” *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas*”, JIUBJ, 2020.

⁷² Baso Iwang, Muh. Arief ariyanto ahmad” *Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*” *Economics and Digital Business Review* Vol. 4 ,2023.

berganda dengan data sekunder dari tahun 2011-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel PDRB dan kemiskinan melalui variabel inflasi.

4. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Juardi, Ahmad, dan Iwang⁷³ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif, dalam Penelitian ini menggunakan data Times series yang dianalisis Model analisis data Regresi Linier berganda dengan menggunakan Program software SPSS. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan Jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel PDRB, Inflasi dan juga variabel tingkat kemiskinan.
5. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Lailan Syafrina Hasibuan⁷⁴ yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis factor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, IPM, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Melalui pengangguran yang dimaksud dalam hal ini adalah angka yang menunjukkan banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. IPM, inflasi dan pertumbuhan

⁷³ Juardi, dkk., “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan” *Bulletin of Economic Studies*, Vol.3 No1, 2023.

⁷⁴ Lailan Syafrina Hasibuan, “ *Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia*” dalam *Jurnal Penelitian Pend. Soshum*, Vol. 8. No.1 ,2023.

ekonomi (PDRB) atas dasar harga konstan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan salah satu indikator, yakni dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dengan PDRB dan pengangguran dengan presentase Angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan dengan inflasi.

Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi

1. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Simangunsong dan Devi⁷⁵ yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 21 periode pengamatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan pendidikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas $0,0004 < 0,05$. Sedangkan pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan koefisien determinasi sebesar 71,66% yang memberikan interpretasi bahwa variasi variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat secara kuat. Hasil penelitian selanjutnya juga memberikan kesimpulan bahwa secara simultan variabel pendidikan, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam menjelaskan hubungan antar variabel pendidikan dengan inflasi terhadap kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah tertentu dan data yang diambil bersumber dari data sekunder dari tahun ke tahun.
2. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Iwang dan Ahmad⁷⁶ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa indikator sosial dan ekonomi

⁷⁵ Bernadeth Y.P.Simangunsong dan Charitin Devi” *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*” dalam Jurnal JAEMB Vol 3 No. 1 Maret ,2023.

⁷⁶ Baso Iwang, Muh. Arief ariyanto ahmad” *Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*” *Economics and Digital Business Review* Vol. 4 ,2023.

yang meliputi jumlah penduduk, pendidikan, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode analisis regresi berganda dengan data sekunder dari tahun 2011-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel Pendidikan dan kemiskinan melalui variabel inflasi.

3. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Juardi, Ahmad, dan Iwang⁷⁷ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif, dalam Penelitian ini menggunakan data Times series yang dianalisis Model analisis data Regresi Linier berganda dengan menggunakan Program software SPSS. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan Jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada variabel pendidikan, Inflasi dan juga variabel tingkat kemiskinan.
4. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Hardana, Nurhalimah, dan Efendi⁷⁸ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kondisi Ekonomi Makro yang meliputi : Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini

⁷⁷ Juardi, dkk., “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan” *Bulletin of Economic Studies*, Vol.3 No1, 2023.

⁷⁸ Ali Hardana, dkk., “Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.1, No.4 , 2022.

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. time series. Dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa : Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tetapi Upah Minimum tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel Pendidikan dan inflasi yang dikorelasikan dengan variabel kemiskinan.

5. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Iwang dan Ahmad⁷⁹ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa indikator sosial dan ekonomi yang meliputi jumlah penduduk, pendidikan, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode analisis regresi berganda dengan data sekunder dari tahun 2011-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel Pendidikan dan kemiskinan melalui variabel inflasi.

Pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui inflasi

1. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Lailan Syafrina Hasibuan⁸⁰ yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis factor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, IPM, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan

⁷⁹ Baso Iwang, Muh. Arief ariyanto ahmad” *Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*” *Economics and Digital Business Review* Vol. 4 ,2023.

⁸⁰ Lailan Syafrina Hasibuan, “ *Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia*” dalam *Jurnal Penelitian Pend. Soshum*, Vol. 8. No.1 ,2023.

terhadap kemiskinan. Melalui pengangguran yang dimaksud dalam hal ini adalah angka yang menunjukkan banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) atas dasar harga konstan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama menggunakan salah satu indikator, yakni dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dengan PDRB dan pengangguran dengan presentase Angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan dengan inflasi.

2. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Sinurat⁸¹ yang bertujuan untuk menguji korelasi antara kemiskinan, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbukti dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran sekaligus. Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik dengan kemiskinan. Sementara itu, inflasi dan pengangguran tidak mempunyai dampak yang besar. Penelitian ini akan memberikan landasan bagi penerapan kebijakan yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel tenaga kerja dimana pada penelitian ini direpresentasikan oleh pengangguran/jumlah Angkatan kerja yaitu penduduk 15 tahun keatas.
3. Hasil uji analisis yang dilakukan oleh Hardana, Nurhalimah, dan Efendi⁸² yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kondisi Ekonomi Makro yang meliputi : Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. time series. Dengan menggunakan analisis regresi

⁸¹ Ronaldo Putra Pratama Sinurat, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia" *Jurnal Registratie* 5, Oktober 2023

⁸² Ali Hardana, dkk, "Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)" *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.1, No.4, 2022.

menunjukkan bahwa : Pertumbuhan Penduduk, Angka Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Inflasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tetapi Upah Minimum tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel tenaga kerja dan inflasi yang dikorelasikan dengan variabel kemiskinan.

4. Uji analisis yang dilakukan oleh Risky, Kindangen dan Walewangko⁸³ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah investasi (PMDN dan PMA), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan, terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis time series sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Path. Hasil analisis menunjukkan investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan tenaga kerja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, akan tetapi tenaga kerja secara tidak langsung belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan variabel tenaga kerja dengan kemiskinan yang akan di uji bagaimana korelasi atau hubungan antar keduanya.

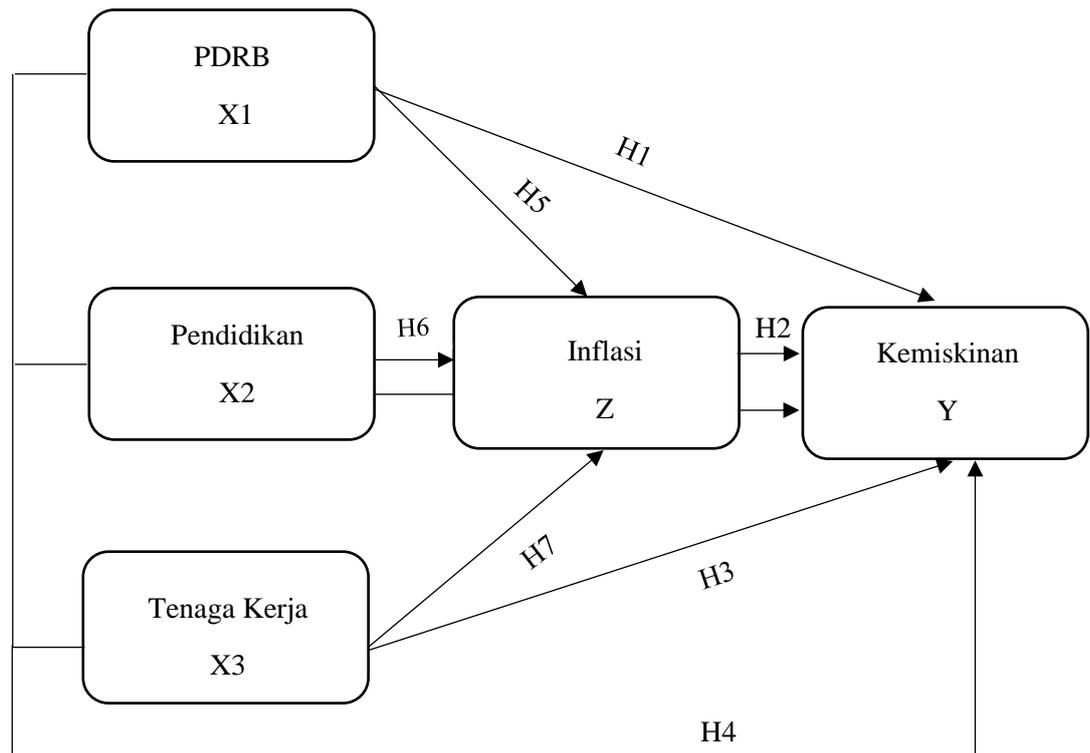
⁸³ Risky Pratama, Prof. Dr. Paulus Kindangen, Een N. Walewangko “*Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sulawesi Utara*” Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

5. Hasil uji analisis oleh Warapsari, Hidayat, Boedirochminarni⁸⁴ yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. variabel Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Itu artinya apabila terjadi kenaikan inflasi, maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Inflasi dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena jumlah rata-rata inflasi di Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan pada variabel tenaga kerja serta inflasi.

⁸⁴ Esthi Bhakti Warapsari, dkk, " *Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur*" Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No. 2, Mei 2020.

G. Kerangka penelitian

Kerangka penelitian menggambarkan hubungan dari variabel independent , dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1), Pendidikan (X2) , Tenaga Kerja (X3) terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan (Y) dengan inflasi (Z) sebagai variabel intervening. Kerangka penelitian dapat dilihat sebagaimana berikut :



Catatan :

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan yang dikuatkan dengan teori Keynesian dan pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, serta John Stuart Mill⁸⁵ dan didukung dengan penelitian terdahulu oleh Aulia Nur Azizah dan Binti Nur Asiyah⁸⁶, Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari⁸⁷ Rapika

⁸⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses.....*, hlm. 236.

⁸⁶ Aulia Nur Azizah, Binti Nur Asiyah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur" dalam *Sibatik Jurnal* Vol. 1 No 12, 2022.

⁸⁷ Lily Leonita, Rini Kurnia Sari "Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia" *Jurnal ISOQUANT* Vol. 3 No. 2, 2019

Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk⁸⁸ Solin, Irda, Fazira dan Ratiwi⁸⁹ Rinawati , Miftitah , Aldianto, Faj'ri, dan Sujianto⁹⁰

2. Pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan yang dikuatkan dengan teori Marjinal dari Lewis⁹¹ dan penelitian terdahulu oleh Randa dan Sentosa⁹² Subiyakto, Nurhayati dan Syafri⁹³ Alwi, Syaparuddin, dan Hardiani⁹⁴, Jacobus, Kindangen, dan Walewangko⁹⁵, Adam, Olilingo dan Santoso⁹⁶
3. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap tingkat kemiskinan yang dikuatkan dengan teori pertumbuhan Neo Klasik yang dikembangkan oleh Robert M. Solow dan T. W. Swan⁹⁷ dan Nurkse dan penelitian terdahulu oleh Hidayat⁹⁸

⁸⁸ Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk” *Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*” Jurnal Darma Agung Vol.28, No 3, 2020.

⁸⁹ Elita Solin et,al. “*Analisis Pengaruh ,Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pakpak Bharat*” dalam Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 1 No 12, 2023.

⁹⁰ Yuni Rinawati, et,al. *Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021* dalam Jurnal EcoGen Universitas Negeri Padang Vol. 5 No. 4 2022.

⁹¹ Sadono Sukirno Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2006).

⁹² Nur Azmi Randa , Sri Ulfa Sentosa, *Analisis Kausalitas Antara Ketimpangan Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia* dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 2, Nomor 1, 2020.

⁹³ Hane Andreanu Subiyakto,et,al” *Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Kemiskinan, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2022*”,dalam Jurnal Neraca Ekonomi, 2023.

⁹⁴ Ahmad Afwan Ali, et,al” *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi 2004-2018*” dalam e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 10. No. 2, 2021.

⁹⁵ Elvira Handayani Jacobus, dkk. “ *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.3 ,2021.

⁹⁶ Deswita Adam, dkk. “*Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utarautara*” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No.1 2022

⁹⁷ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Volume 1 dari Ekonomi Makro*, (Jakarkat: Mitra Wacana Media), hlm. 428

⁹⁸ Taufik Hidayat,” *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara*” Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan,2023.

- Prasetya dan Sumanto⁹⁹ Salsabilla, Juliannisa dan triwahyuningtyas¹⁰⁰, Elisabeth Sitanggung¹⁰¹ Risky, Kindangen dan Walewangko¹⁰²
4. Pengaruh PDRB, tenaga kerja, Pendidikan terhadap kemiskinan melalui inflasi sebagai variabel intervening yang dikuatkan dengan teori Keynesian¹⁰³ dan didukung dengan penelitian terdahulu oleh Hasibuan, Rujiman, dan Sukardi¹⁰⁴ Juardi, Ahmad, dan Iwang¹⁰⁵ Hardana, Nurhalimah, dan Efendi¹⁰⁶ Yusnafira, Nursini dan Fitrianti¹⁰⁷ Sipahutar, Anjelina, dkk¹⁰⁸
 5. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan melalui inflasi sebagai variabel intervening yang dikuatkan dengan teori monetaris dan teori non monetaris.¹⁰⁹, Teori Permintaan (John Maynard Keynes)¹¹⁰ dan penelitian terdahulu oleh Vega Sofie Kharisma Putri¹¹¹ Wijaya, Istiqomah dan

⁹⁹ Gabriella Megawati Prasetya, Agus Sumanto, "Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi" dalam KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19, 2022.

¹⁰⁰ Ayu Salsabilla, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta" Jurnal Ikraith-Ekonomika No 2 Vol 5, 2022.

¹⁰¹ Dessy Chayani Elisabeth Sitanggung, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara" CERMIN : Jurnal Penelitian, Vol 4, No 2, 2020.

¹⁰² Risky Pratama, Prof. Dr. Paulus Kindangen, Een N. Walewangko "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sulawesi Utara" Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

¹⁰³ Priyono, Teddy Chandra, Esensi Ekonomi Makro, Sidoarjo: Zifatama Publisher. (2016)

¹⁰⁴ Lailan Syafrina Hasibuan, dkk, "Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia" dalam Jurnal Penelitian Pend. Soshum Vol. 5. No. 2, 2020

¹⁰⁵ Juardi, dkk., "Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan" Bulletin of Economic Studies, Vol.3 No1, 2023

¹⁰⁶ Ali Hardana, dkk, "Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)" Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.1, No.4, 2022.

¹⁰⁷ Andi Velia Yusnafira, dkk, "Analisis Kemiskinan Kabupaten Bone" Jurnal Mirai Management Vol. 8, 2023.

¹⁰⁸ Tetty Tiurma Uli Sipahutar, dkk., "Pengaruh Pengangguran (Tenaga Kerja), Kemiskinan, Inflasi Dan Konsumsi Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Periode 2015-2019" Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 2, 2021.

¹⁰⁹ Ida Musdafiah, Irawan Budianto, Mengenal Lintas Ilmu Ekonomi, (Tangerang: Indigo Media, 2023) hlm.89-90

¹¹⁰ Henry Sarwono dan Danang Sunyato, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Jakarta: CAPS, 2020), hlm. 78.

¹¹¹ Vega Sofie Kharisma Putri, "Pengaruh Nilai Tukar Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Ekspor Textile Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening" dalam Jurnal Unimma, 2020

Arintoko¹¹² Iwang dan Ahmad¹¹³ Juardi, Ahmad, dan Iwang¹¹⁴ Lailan Syafrina Hasibuan¹¹⁵

6. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan melalui inflasi sebagai variabel intervening yang dikuatkan dengan teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen yang dikemukakan oleh M Friedman¹¹⁶ Simangunsong dan Devi¹¹⁷, Iwang dan Ahmad¹¹⁸, Juardi, Ahmad, dan Iwang¹¹⁹ Hardana, Nurhalimah, dan Efendi¹²⁰ Iwang dan Ahmad¹²¹
7. Pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui inflasi sebagai variabel intervening yang dikuatkan dengan teori Keynesian dalam bukunya *the general theory of employment. Interest and money*¹²² dengan didukung penelitian terdahulu Lailan Syafrina Hasibuan¹²³, Sinurat¹²⁴ Hardana,

¹¹² Hendry Wijaya, dkk.,” *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banyumas)*”, JIUBJ, 2020.

¹¹³ Baso Iwang, Muh. Arief ariyanto ahmad” *Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*” *Economics and Digital Business Review* Vol. 4 ,2023.

¹¹⁴ Juardi, dkk., “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan” *Bulletin of Economic Studies*, Vol.3 No1, 2023.

¹¹⁵ Lailan Syafrina Hasibuan, “ *Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia*” dalam *Jurnal Penelitian Pend. Soshum*, Vol. 8. No.1 ,2023.

¹¹⁶ Priyono, Teddy Chandra,Esensi Ekonomi Makro,Sidoarjo:Zifatama Publisher. (2016)

¹¹⁷ Bernadeth Y.P.Simangunsong dan Charitin Devi” *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*” dalam *Jurnal JAEMB* Vol 3 No. 1 Maret ,2023.

¹¹⁸ Baso Iwang, Muh. Arief ariyanto ahmad” *Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*” *Economics and Digital Business Review* Vol. 4 ,2023.

¹¹⁹ Juardi, dkk., “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan” *Bulletin of Economic Studies*, Vol.3 No1, 2023.

¹²⁰ Ali Hardana, dkk,” *Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol.1, No.4 , 2022.

¹²¹ Baso Iwang, Muh. Arief ariyanto ahmad” *Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*” *Economics and Digital Business Review* Vol. 4 ,2023.

¹²² Priyono, Teddy Chandra,Esensi Ekonomi Makro,Sidoarjo:Zifatama Publisher. (2016)

¹²³ Lailan Syafrina Hasibuan, “ *Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia*” dalam *Jurnal Penelitian Pend. Soshum*, Vol. 8. No.1 ,2023.

¹²⁴ Ronaldo Putra Pratama Sinurat,” *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*” *Jurnal Registratie* 5 , Oktober 2023

Nurhalimah, dan Efendi¹²⁵ Risky, Kindangen dan Walewangko¹²⁶ Warapsari, Hidayat, Boedirochminarni¹²⁷

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis tersebut baru dapat diuji kebenarannya lewat penganalisaan dan penelitian. Hipotesis ini dapat berupa hubungan positif maupun negatif, tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut:

H1 : diduga PDRB berpengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022

H2 : diduga pendidikan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022

H3 : diduga tenaga kerja berpengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022

H4 : diduga PDRB, pendidikan dan tenaga kerja berpengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2018-2022

H5 : diduga PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan melalui Inflasi di Perkotaan di Jawa Timur tahun 2018-2022

H6 : diduga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui Inflasi di Perkotaan di Jawa Timur tahun 2018-2022

¹²⁵ Ali Hardana, dkk, "Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)" Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol.1, No.4, 2022.

¹²⁶ Risky Pratama, Prof. Dr. Paulus Kindangen, Een N. Walewangko "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sulawesi Utara" Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

¹²⁷ Esthi Bhakti Warapsari, dkk, "Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur" Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No. 2, Mei 2020.

H7 :diduga tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui Inflasi di Perkotaan di Jawa Timur tahun 2018-2022